



LAPORAN KEUANGAN

STASIUN KIPM GORONTALO

Untuk Periode Berakhir 31 Desember 2024 (Audited)

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun 2022, bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun KIPM Gorontalo adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan Laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

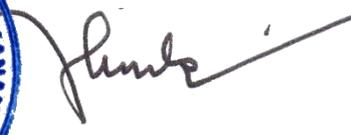
Penyusunan Laporan Keuangan Stasiun KIPM Gorontalo mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang Transparan, Akurat dan Akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna Laporan dan sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Stasiun KIPM Gorontalo.

Di samping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Gorontalo, 15 Januari 2025
Kepala,


Abdul Kadir, S.Pi.M.Si
NIP 197303021999031003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Ringkasan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca.....	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun KIPM Gorontalo.....	7
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	16
A.3. Basis Akuntansi	16
A.4. Dasar Pengukuran.....	17
A.5. Kebijakan Akuntansi.....	17
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	26
B.1. Pendapatan.....	27
B.2. Belanja.....	29
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	34
C.1. Aset Lancar.....	34
C.2. Aset Tetap	38
C.3. Piutang Jangka Panjang.....	42
C.4. Aset Lainnya	43
C.5. Kewajiban	44
C.6. Ekuitas	46
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	44
D.1. Pendapatan Operasional.....	47
D.2. Beban Pegawai.....	47

D.3. Beban Persediaan	48
D.4. Beban Barang dan Jasa.....	49
D.5. Beban Pemeliharaan	50
D.6. Beban Perjalanan Dinas.....	50
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	51
D.8. Beban Bantuan Sosial	51
D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi	52
D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	52
D.11. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	53
D.12. Pos Luar Biasa	53
E. Penjelasan atas Pos-pos Perubahan Ekuitas	54
E.1. Ekuitas Awal	54
E.2. Surplus (Defisit) LO	54
E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	54
E.4. Transaksi Antar Entitas	55
E.5. Ekuitas Akhir	56
F. Pengungkapan Penting Lainnya.....	57
F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	57
F.2. Pengungkapan Lain-lain	57



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN GORONTALO**

JALAN ACHMAD NADJAMUDDIN NOMOR 20 GORONTALO 96128
TELEPON (0435) 824071, FAKSIMILE (0435) 824071
LAMAN www.kkp.go.id, SURAT ELEKTRONIK skipm.gorontalo@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Stasiun KIPM Gorontalo yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 komprehensif sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Gorontalo, 15 Januari 2025
Kepala,

Abdul Kadir
Abdul Kadir, S.Pi.M.Si
NIP 197303021999031003

Laporan Keuangan Stasiun KIPM Gorontalo Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Realisasi Pendapatan Negara s.d Desember 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp30.252.797 atau mencapai 166 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp18.225.000 sedangkan Realisasi Belanja s.d Desember 2024 adalah sebesar Rp3.808.260.817 atau mencapai 99 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp3.857.942.000 Realisasi Belanja terdiri dari Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.903.176.191, Realisasi Belanja Barang sebesar Rp1.905.084.626, dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp0.

2. NERACA

Neraca Tahun 2024 menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp6.940.421.091 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp8.991.874; Aset Tetap (neto) sebesar Rp6.931.429.217 Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp9.817.991 dan Rp6.940.421.091..

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional Tahun 2024 menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp29.010.000 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp4.339.696.581 sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional senilai (Rp4.310.686.581). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp652.206 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp4.310.034.375).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024 menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp10.641.895.161, dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp4.310.034.375) kemudian ditambah dengan koreksi lain-lain senilai Rp2.714 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp598.739.600 sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp6.930.603.100.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

**I. LAPORAN
REALISASI ANGGARAN**

STASIUN KIPM GORONTALO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024		% Thn Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Pendapatan PNB	B.1	18.225.000	30.252.797	166	16.832.968
Jumlah Pendapatan		18.225.000	30.252.797	166	16.832.968
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	1.908.808.000	1.903.176.191	99	3.472.525.052
Belanja Barang	B.4	1.949.134.000	1.905.084.626	98	2.448.995.737
Belanja Modal	B.5	-	-	0	183.304.500
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	#DIV/0!	-
Jumlah Belanja		3.857.942.000	3.808.260.817	99,29	6.104.825.289

II. NERACA

STASIUN KIPM GORONTALO
NERACA
UNTUK PERIODE BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2024	TA 2023
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	0	542.797
Bagian Lancar TP/TGR	C.1.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.1.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.7	0	(2.714)
Belanja Dibayar di Muka	C.1.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.1.9	-	-
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.1.10	0	540.083
Persediaan	C.1.11	8.991.874	147.616.449
JUMLAH ASET LANCAR		8.991.874	148.156.532
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	3.719.905.000	5.028.779.785
Peralatan dan Mesin	C.2.2	4.600.647.392	5.755.700.620
Gedung dan Bangunan	C.2.3	3.021.985.932	4.964.613.010
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.4	154.013.000	254.281.160
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	45.170.000	45.170.000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.2.6	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(4.610.292.107)	(5.536.612.444)
JUMLAH ASET TETAP		6.931.429.217	10.511.932.131
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.3		
Tagihan TP/TGR	C.3.1	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.3.2	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.3.3	-	-
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		0	0
ASET LAINNYA	C.4		
Aset Tidak Berwujud	C.4.1	-	-
Aset Lain-Lain	C.4.2	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3	-	-
JUMLAH ASET LAINNYA		0	0
JUMLAH ASET		6.940.421.091	10.660.088.663
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.5		
Uang Muka dari KPPN	C.5.1	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.2	9.817.991	18.193.502
Pendapatan Diterima Dimuka	C.5.3	-	-
Beban Yang Masih Harus Dibayar	C.5.4	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		9.817.991	18.193.502
JUMLAH KEWAJIBAN		9.817.991	18.193.502
EKUITAS			
Ekuitas	C.6	6.930.603.100	10.641.895.161
JUMLAH EKUITAS		6.930.603.100	10.641.895.161
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		6.940.421.091	10.660.088.663

III. LAPORAN OPERASIONAL

STASIUN KIPM GORONTALO
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024	TA 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	29.010.000	15.570.000
JUMLAH PENDAPATAN		29.010.000	15.570.000
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	1.903.176.191	3.471.982.255
Beban Persediaan	D.3	146.731.016	185.063.342
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.149.937.875	1.292.535.057
Beban Pemeliharaan	D.5	351.511.548	318.924.945
Beban Perjalanan Dinas	D.6	387.472.957	586.599.831
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	400.866.994	531.137.236
Beban Penyisihan Piutang tak tertagih	D.10	-	2.714
JUMLAH BEBAN		4.339.696.581	6.386.245.380
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(4.310.686.581)	(6.370.675.380)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/defisit Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Pendapatan pelepasan aset non lancar		-	-
Beban pelepasan aset non lancar		-	-
Surplus/defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya		652.206	1.080.000
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya		700.000	1.080.000
Beban dari kegiatan non operasional lainnya		47.794	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11	652.206	1.080.000
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(4.310.034.375)	(6.369.595.380)
POS LUAR BIASA			
Pos Luar Biasa	D.12	-	-
Beban Luar Biasa		-	-
Pos Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(4.310.034.375)	(6.369.595.380)

**IV. LAPORAN
PERUBAHAN EKUITAS**

STASIUN KIPM GORONTALO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024	TA 2023
EKUITAS AWAL	E.1	10.641.895.161	10.923.497.305
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	-4.310.034.375	-6.369.595.380
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	2.714	915
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.2	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.3	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.4	-	-
Koreksi Lain-lain	E.3.5	2.714	915
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	598.739.600	6.087.992.321
KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS		(3.711.292.061)	(281.602.144)
EKUITAS AKHIR	E.5	6.930.603.100	10.641.895.161

A. PENJELASAN UMUM

Rencana Strategis

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun KIPM Gorontalo

Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan Tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Tahapan dalam perencanaan pembangunan terdiri atas empat tahapan, yakni:

- (1) penyusunan rencana,
- (2) penetapan rencana,
- (3) pengendalian pelaksanaan rencana, dan
- (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu ***“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”***. Visi tersebut diwujudkan dalam sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

- (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia,
- (2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing,
- (3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan,
- (4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan,
- (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa,

- (6) P enegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- (7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa,
- (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- (9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Berdasarkan RPJMN dan arahan-arahan Presiden, sasaran pembangunan kelautan dan perikanan selain menitikberatkan pembangunan pada pengarustamaan tujuan pembangunan berkelanjutan, sosial budaya, gender dan transformasi digital, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan nilai tambah dan daya saing, serta konsumsi ikan masyarakat, untuk memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju.

Presiden juga memberikan dua arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk :

- (1) membangun komunikasi dengan *stakeholders* kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan kelautan, dan pengusaha bidang kelautan dan perikanan, dan
- (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan difokuskan

untuk mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, mengoptimalkan produksi perikanan budidaya, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, serta mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan keanekaragaman hayati ikan untuk keberlanjutan. Sasaran yang hendak dicapai dari arah kebijakan dan strategi tersebut adalah peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kelautan dan perikanan khususnya peningkatan produksi perikanan budidaya, maka keterkaitan mendasar peran Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah kemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan ikan, kualitas dan keamanan pangan produk perikanan sesuai dengan standar nasional, dan kemampuannya dalam memitigasi gangguan terhadap produktivitas pengelolaan perikanan dari risiko ancaman serangan hama dan penyakit ikan karantina.

Keterkaitan fungsi BKIPM dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mencapai sasaran peningkatan kinerja ekspor, khususnya untuk komoditas unggulan perikanan, seperti tuna, cakalang, tongkol (TCT), rajungan, udang, nila, lele/patin, bandeng dan rumput laut, serta komoditas perikanan bernilai ekonomis tinggi lainnya, seperti ikan hias tropis Indonesia adalah bagaimana peran BKIPM mampu secara efektif melaksanakan pengawasan/ pengendalian (*official control*) secara efektif. Hasil audit dan verifikasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di unit-unit pengolahan ikan, sertifikasi, ketertelusuran (*traceability*), dan tindakan karantina dapat membantu dan memfasilitasi layanan sertifikasi ekspor produk

perikanan yang memenuhi standar maupun ketentuan regulasi internasional, seperti SPS dan *Codex Alimentarius*., atau memenuhi ekuivalensi dalam inspeksi/tindakan karantina yang tertuang dalam MoU/MRA dengan negara mitra tujuan ekspor. Sertifikasi yang diterbitkan BKIPM merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dan bersifat *mandatory*, tidak hanya sebagai jaminan dan standar perdagangan internasional, tetapi juga merupakan indikator keberhasilan akses pasar di negara tujuan, dan berfungsi juga untuk membangun kepercayaan konsumen akan reputasi pangan produk perikanan Indonesia. Dalam perumusan kebijakan dan strategi pembangunan BKIPM sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dimaknai sebagai kondisi yang berhubungan dengan bagaimana kekuatan BKIPM dapat menterjemahkan kapabilitasnya untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan pada RPJMN 2020 -2024 dan arahan-arahan Menteri Kelautan dan Perikanan. Disamping faktor internal, faktor eksternal yang berpengaruh dalam pembangunan kelautan dan perikanan adalah bagaimana peran BKIPM dapat menyelaraskan diri terhadap faktor dinamika perubahan kebijakan pemerintah dan perkembangan system perdagangan internasional, kerjasama bilateral, regional, multilateral, MoU/MRA, harmonisasi standar dan sinkronisasi regulasi, jaminan perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan hidup untuk menjadikan kebijakan standar dan regulasi nasional maupun internasional tidak menjadi penghalang dalam pencapaian kinerja BKIPM. Faktor-faktor internal dan eksternal, potensi dan tantangan yang dihadapi merupakan hal yang menjadi pertimbangan dalam proses penyusunan Rencana Strategis Stasiun KIPM Gorontalo Tahun 2020 - 2024.

Visi Presiden Republik Indonesia yakni “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang diamanatkan, BKIPM melaksanakan 3 dari 4 misi KKP dalam Renstra 2020-2024, yaitu :

1. **“Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing”**, melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional;
2. **“Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan”**, melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan;
3. **“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya”**, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan dari hulu sampai hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024, telah ditetapkan 4 tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

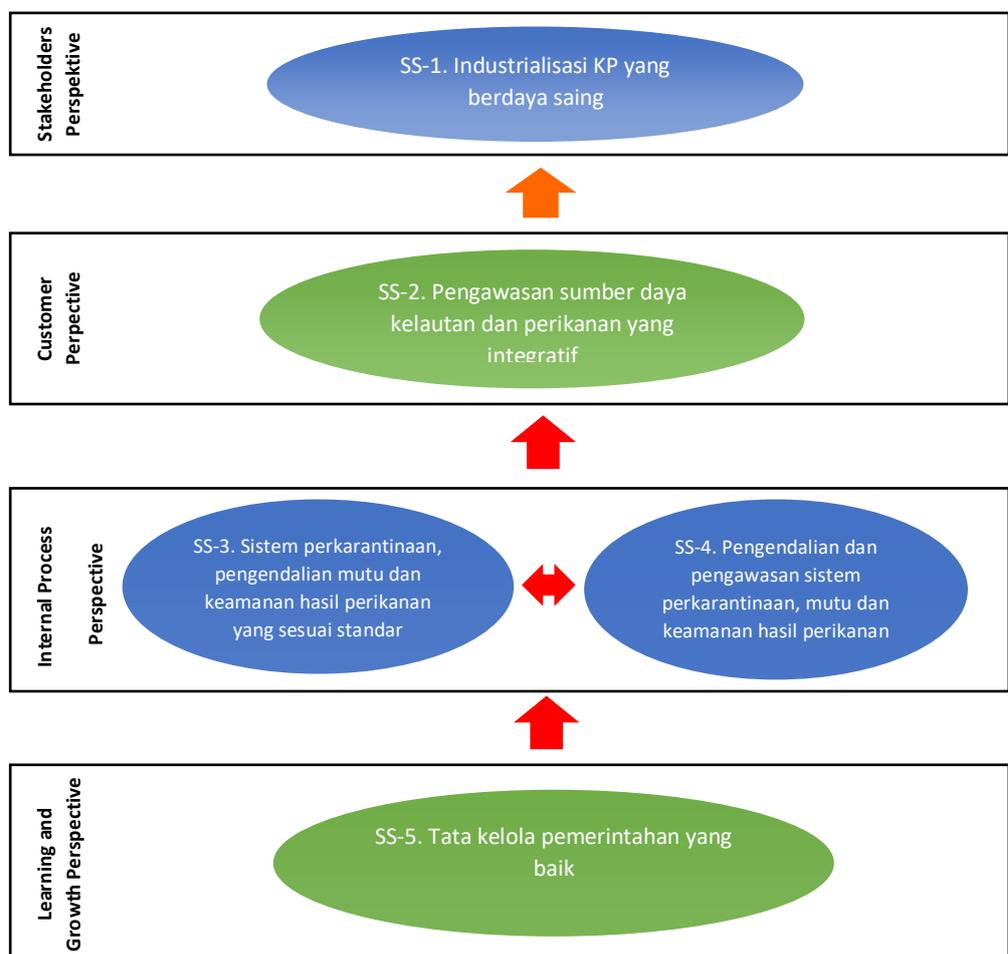
BKIPM bertanggung jawab pada pencapaian tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut, yaitu :

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan;
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan;
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif;
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BKIPM.

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Stasiun KIPM Gorontalo sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Sasaran strategis Stasiun KIPM Gorontalo Tahun 2020-2024, terdiri dari :

1. Industrialisasi KP yang berdaya saing;
2. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif;
3. Sistem perkarantinaan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar;
4. Pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif;
5. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam penyusunan Peta Strategi, Stasiun KIPM Gorontalo menggunakan empat perspektif yaitu *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, dengan Peta Strategi sebagai berikut :



Gambar 1. Peta Strategis Stasiun KIPM Gorontalo

Arah kebijakan dan strategi BKIPM Tahun 2020-2024 untuk mewujudkan 6 tujuan BKIPM dan dukungannya terhadap mandat yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi BKIPM adalah sebagai berikut :

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional;
2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional;
3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, di pos lintas batas negara, dan di SKPT yang berada di pulau terluar melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang karantina ikan dan perikanan;

4. Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun antar area di dalam wilayah NKRI;
5. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan *dwelling time* pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan *join inspection* dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi public;
7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian;
8. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data;
9. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBPK BIPM adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBPK berbasis digital.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun KIPM Gorontalo. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Stasiun KIPM Gorontalo menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Stasiun KIPM Gorontalo dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Stasiun KIPM Gorontalo adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Beban

(3) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(4) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset
Lancar*

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 Tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR)

atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Masa Manfaat Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 Tahun

*Aset
Lainnya*

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan) dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(5) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(6) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Stasiun KIPM Gorontalo telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sampai dengan Revisi ke 12 dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

Rekapitulasi Revisi DIPA TA 2024

No	Uraian	Tanggal Revisi	Alasan Revisi
1	Data Awal	24 Nopember 2023	DIPA Awal
2	Revisi Ke-1	15 Januari 2024	Revisi Realokasi Anggaran
3	Revisi Ke-2	25 Januari 2024	Revisi POK
4	Revisi Ke-3	21 Februari 2024	Revisi Pemutakhiran Hal III DIPA
5	Revisi Ke-4	24 April 2024	Revisi Pemutakhiran Hal III DIPA
6	Revisi Ke-5	03 Juni 2024	Revisi Pemutakhiran Hal III DIPA
7	Revisi Ke-6	23 Juli 2024	Revisi Buka Blokir
8	Revisi Ke-7	16 Oktober 2024	Revisi Pemutakhiran Hal III DIPA
9	Revisi Ke-8	05 November 2024	Rekomposisi Anggaran antar Satker lingkup BPPMHKP
10	Revisi Ke-9	20 November 2024	Penghematan Anggaran Perjadin
11	Revisi Ke-10	03 Desember 2024	Revisi POK
12	Revisi Ke-11	05 Desember 2024	Revisi POK
13	Revisi Ke-12	27 Desember 2024	Revisi POK

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	Tahun Anggaran 2024	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNBP	18.225.000	18.225.000
Jumlah Pendapatan	18.225.000	18.225.000
Belanja		
Belanja Pegawai	3.501.629.000	1.908.808.000
Belanja Barang	2.496.964.000	1.949.134.000
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	5.998.593.000	3.857.942.000

B.1. Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan
Rp30.252.797*

Realisasi Pendapatan TA 2024 adalah sebesar Rp30.252.797 atau mencapai 166 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp18.225.000. Berikut Pendapatan Stasiun KIPM Gorontalo:

Uraian	TA 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi	17.225.000	28.930.000	168
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	1.000.000	80.000	10
Pendapatan PNBP Lainnya			
Pendapatan dari penjualan tanah , gedung dan bangunan		-	-
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin		-	-
Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah		-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL		542.797	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL		700.000	-
<i>Total Pendapatan PNBP Lainnya</i>		1.242.797	
Jumlah	18.225.000	30.252.797	166

Pendapatan PNBP TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 80 persen dibandingkan TA 2023.

Di bawah ini adalah tabel perbandingan pencapaian realisasi PNBP TA.2024 dan TA.2023

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023

URAIAN	TA 2024	TA 2023	Naik/Turun (%)
Pendapatan PNBP	30.252.797,	16.832.968,	80
Jumlah	30.252.797	16.832.968	80

Berikut ini adalah pendapatan penerimaan negara bukan pajak Tahun 2024 pada Stasiun KIPM Gorontalo yaitu:

- Pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan standardisasi lainnya sebesar Rp28.930.000 pendapatan ini merupakan pendapatan fungsional dari Stasiun KIPM Gorontalo;
- Pendapatan Jasa Karantina Perikanan sebesar Rp80.000 pendapatan ini merupakan pendapatan fungsional dari Stasiun KIPM Gorontalo;
- Penerimaan kembali belanja pegawai dan barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp1.242.797. pendapatan ini merupakan :
 - Penerimaan kembali belanja pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp542.797. pendapatan ini merupakan Pengembalian Tunjangan Kinerja pegawai Bulan Desember 2023 yang disetor melalui potongan tukin Januari 2024 dengan SPM Nomor : 00015A Tanggal 12 Februari 2024.
 - Penerimaan kembali belanja barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp700.000 pendapatan ini merupakan Pengembalian belanja perjalanan dinas tahun 2023 yang sudah disetor dengan

NTB nomor 933585141621 dan NTPN nomor OB6907QLUP15G7K2 pada tanggal 11 Oktober 2024.

B.2. Belanja

*Realisasi Belanja Negara (Netto)
Rp3.808.260.817*

Realisasi Belanja TA 2024 adalah sebesar Rp3.808.260.817 atau 99,29 persen dari anggaran belanja sebesar Rp3.857.942.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

URAIAN	TA 2024				
	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Netto	Persentase Anggaran
Belanja Pegawai	1.908.808.000	1.903.176.631	440	1.903.176.191	99,70
Belanja Barang	1.949.134.000	1.905.842.626	758.000	1.905.084.626	98,00
Belanja Modal	-	-	-	-	#DIV/0!
Jumlah	3.857.942.000	3.809.019.257	758.440	3.808.260.817	99,29

Realisasi belanja TA 2024 mengalami penurunan sebesar 37,62 persen dibandingkan dengan TA 2023 hal ini disebabkan dari segi penetapan pagu anggaran Tahun 2023 lebih besar dibandingkan Tahun 2024 yang otomatis mempengaruhi persentasi penurunan belanja pegawai maupun belanja barang.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

URAIAN	TA 2024	TA 2023	Naik/Turun (%)
Belanja Pegawai	1.903.176.191	3.472.525.052	(45,19)
Belanja Barang	1.905.084.626	2.448.995.737	(22,21)
Belanja Modal	-	183.304.500	(100,00)
Jumlah	3.808.260.817	6.104.825.289	(37,62)

B.3. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp1.903.176.191

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.903.176.191 dan Rp3.472.525.052 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai TA 2024 mengalami penurunan sebesar 45,19 persen dari TA 2023.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	671.596.900	1.238.213.300	-45,76%
Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.410	18.030	-36,72%
Belanja Tunj. Suami Istri PNS	40.419.440,	92.887.310,	-56,49%
Belanja Tunj. Anak PNS	12.669.038,	28.621.114,	-55,74%
Belanja Tunj. Struktural PNS	12.600.000,	12.600.000,	0,00%
Belanja Tunj. Fungsional PNS	33.470.000,	95.880.000,	-65,09%
Belanja Tunj. PPh PNS	4.243.626,	671.500,	531,96%
Belanja Tunj. Beras PNS	33.240.780,	80.965.560,	-58,94%
Belanja Uang Makan PNS	90.150.000,	209.627.000,	-57,00%
Belanja Tunjangan Umum PNS	10.580.000,	12.740.000,	-16,95%
Belanja Gaji Pokok PPPK	38.443.200,		
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	355,		
Belanja Tunj. Beras PPPK	869.040,		
Belanja Uang Makan PPPK	6.452.800,		
Belanja Tunjangan Umum PPPK	2.220.000,		
Belanja Uang Lembur	27.460.000,	76.460.000,	-64,09%
Belanja Uang Lembur PPPK	1.256.000,		
Belanja Tunj Khusus atau kegiatan	864.951.678,	1.623.920.449,	-46,74%
Belanja Tunj Khusus atau kegiatan PPPK	52.542.364,	0,	10000,00%
Jumlah Belanja Kotor	1.903.176.631	3.472.604.263	-45,19%
Pengembalian Belanja Pegawai	440	79.211	-99,44%
Jumlah Belanja	1.903.176.191	3.472.525.052	-45,19%

Faktor-faktor yang menyebabkan adanya penurunan belanja pegawai Stasiun KIPM Gorontalo adalah sebagai berikut:

- Adanya mutasi sebagian pegawai dari Stasiun KIPM Gorontalo ke BKHIT Gorontalo.
- Anggaran belanja pegawai TA 2024 berkurang sehingga mempengaruhi realisasi jika dibandingkan anggaran belanja pegawai TA 2023.

B.4. Belanja Barang

Belanja Barang
Rp1.905.084.626

Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.905.084.626 dan Rp2.448.995.737. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami penurunan 22,21 persen dari TA 2023.

Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan TA 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	617.176.633	889.828.773	(30,64)
Belanja Barang Non Operasional	34.268.700	92.224.700	(62,84)
Belanja Barang Persediaan	55.371.000	302.620.585	(81,70)
Belanja Jasa	507.476.053	310.045.683	63,68
Belanja Pemeliharaan	303.927.283	271.426.835	11,97
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	387.622.957	588.719.831	(34,16)
Jumlah Belanja Kotor	1.905.842.626	2.454.866.407	(22,36)
Pengembalian Belanja	758.000	5.870.670	(87,09)
Jumlah Belanja	1.905.084.626	2.448.995.737	(22,21)

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa pada Tahun 2024 terdapat penurunan realisasi belanja barang sebesar 22,21 persen dibandingkan Tahun 2023. Kenaikan pada realisasi Anggaran pemeliharaan dan jasa sedangkan penurunan ada pada pos belanja operasional dan perjalan.

B.5. Belanja Modal

*Belanja Modal
Rp0*

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal TA 2024. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	183.304.500	- 100
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	183.304.500	- 100
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	0	183.304.500	(100)

B.5.1 Belanja Modal Tanah

*Belanja Modal
Tanah
Rp.0*

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan TA 2023

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin Rp0*

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp183.304.500.

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp.0,*

Tidak terdapat Realisasi belanja modal gedung dan bangunan TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp0.

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Belanja Modal
Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp.0*

Tidak terdapat Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan TA 2024 dan TA 2023

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

*Belanja Modal
Lainnya
Rp0*

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2024 dan TA 2023

B.6. Belanja Bantuan Sosial

*Belanja Bantuan
Sosial
Rp0*

Tidak terdapat Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset

C.1.1 Kas Di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0*

Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab dari bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa UP dan TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke kas negara per tanggal neraca.

C.1.2 Kas Di Bendahara Penerimaan

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0*

Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024.

C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp0*

Tidak terdapat Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024.

C.1.4 Piutang Bukan Pajak

*Piutang Bukan Pajak
Rp0*

Tidak terdapat saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024

C.1.5 Bagian Lancar TP/TGR

*Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tun-
tutan Ganti Rugi
(TP/TGR)
Rp0*

Tidak terdapat saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024.

<i>Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp0</i>	<p>C.1.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran</p> <hr/> <p>Tidak terdapat Saldo Bagian lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2024</p>
<i>Penyisihan Piutang tidak tertagih- Piutang JK Pendek Rp0</i>	<p>C.1.7 Penyisihan Piutang tidak tertagih-Piutang JK Pendek</p> <hr/> <p>Tidak terdapat saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2024</p>
<i>Beban Dibayar Dimuka Rp0</i>	<p>C.1.8 Beban Dibayar Dimuka</p> <hr/> <p>Tidak terdapat saldo Belanja dibayar di muka per 31 Desember 2024</p>
<i>Pendapatan yang Masih harus Diterima Rp0</i>	<p>C.1.9 Pendapatan yang Masih harus Diterima</p> <hr/> <p>Tidak terdapat Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Stasiun KIPM Gorontalo per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.</p>
<i>Piutang Bukan Pajak (Netto) Rp0</i>	<p>C.1.10 Piutang Bukan Pajak (Netto)</p> <hr/> <p>Tidak terdapat saldo Piutang Bukan Pajak (Netto) per 31 Desember TA 2024.</p>
<i>Persediaan Rp8.991.874</i>	<p>C.1.11 Persediaan</p> <hr/> <p>Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp8.991.874 dan Rp147.616.449. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.</p>

Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Persediaan TA 2024 dan TA 2023

Jenis	TA 2024	TA 2023
Barang Konsumsi (117111)	8.852.874	116.571.184
Bahan untuk Pemeliharaan (117113)	139.000	120.000
Bahan Baku (117131)	-	-
Suku Cadang (117114)	-	30.925.265
Jumlah	8.991.874	147.616.449

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap
Rp6.931.429.217

Saldo Aset Tetap Stasiun KIPM Gorontalo per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp6.931.429.217 dan Rp10.511.932.131. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap Stasiun KIPM Gorontalo berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

C.2.1. Tanah

Tanah
Rp3.719.905.000

Nilai aset tanah yang dimiliki Stasiun KIPM Gorontalo per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp3.719.905.000 dan Rp5.028.779.785.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	5.028.779.785
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Koreksi tambah	-
Mutasi kurang:	-
Transfer keluar BKHIT Gorontalo	1.308.874.785
Saldo per 31 Desember 2024	3.719.905.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	3.719.905.000

Terdapat mutasi kurang (transfer keluar) aset tanah stasiun KIPM Gorontalo sebesar Rp1.308.874.785 ke satker BKHIT Gorontalo. Rincian aset tanah yang ditransfer keluar adalah sebagai berikut :

- Tanah yang terletak di Jalan Mayor Dullah Kota Gorontalo dengan nilai sebesar Rp796.535.000.
- Tanah yang terletak di Jalan Trans Sulawesi Kabupaten Gorontalo dengan nilai sebesar Rp512.339.785.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan Mesin
Rp4.600.647.392*

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp4.600.647.392 dan Rp5.755.700.620.

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2023	5.755.700.620
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Koreksi tambah	-
Mutasi kurang:	-
Transfer keluar ke BKHIT Gorontalo	1.155.053.228
Saldo Per 31 Desember 2024	4.600.647.392
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	4.174.634.582
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	426.012.810

Terdapat mutasi kurang (transfer keluar) aset peralatan dan mesin stasiun KIPM Gorontalo sebesar Rp1.155.053.228 ke satker BKHIT Gorontalo. Rincian aset peralatan dan mesin yang ditransfer keluar adalah sebagai berikut :

Nama Barang	Kuantitas	Nilai
Mesin Absensi	1	6.000.000
CCTV - Camera Control Television System	1	13.200.000
Papan Visual/Papan Nama	2	38.800.000
Lemari Es	2	5.500.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	7.714.500
Microscope	2	178.084.417
Refrigerator	2	9.000.000
Analytical Balance (Alat Laboratorium Mikrobiologi)	1	27.322.000
Micro Pipettes	2	7.800.000
Lap Top	6	82.156.000
PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	1	1.030.000
Water Quality Checker	1	123.659.317
Meja Makan Kayu	1	800.000
Thermos Es	2	1.600.000
P.C Unit	3	41.970.000
Sice	7	45.950.000
Vortex Mixer(Alat Laboratorium Pertanian)	1	7.379.417
Meja Rapat	1	1.540.000
Timbangan/Neraca	4	8.330.800
Microscope Dengan Camera	1	30.589.417
Pippet Machine	2	26.528.834
Water Bath (Alat Laboratorium Tekanan Dan Suhu)	1	14.085.000
Sepeda Motor	11	193.130.694
Digital Indicator LCD/Metric	1	13.420.000
A.C. Split	5	50.480.000
Kursi Besi/Metal	17	30.900.000
Lemari Asam	1	28.850.000
Bak Fiberglass	1	2.100.000
Refractometer (Alat Laboratorium Umum)	1	7.400.000
Micropipette 50-200 UI	2	15.088.832
Meja Kerja Kayu	7	30.644.000
Autoclave (Alat Laboratorium Umum)	2	104.000.000
Jumlah Nilai	94	1.155.053.228

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan
Rp3.021.985.932*

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp3.021.985.932 dan Rp4.964.613.010.

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2023	4.964.613.010
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Koreksi tambah	-
Mutasi kurang:	-
Transfer keluar ke BKHIT Gorontalo	1.942.627.078
Saldo Per 31 Desember 2024	3.021.985.932
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	393.318.336
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	2.628.667.596

Terdapat mutasi kurang (transfer keluar) aset Gedung dan Bangunan stasiun KIPM Gorontalo sebesar Rp1.942.627.078 ke satker BKHIT Gorontalo. Rincian aset Gedung dan Bangunan yang ditransfer keluar adalah sebagai berikut :

Nama Barang	Kuantitas	Nilai
Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	1.270.877.683
Pagar Permanen	1	271.664.445
Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	2	153.337.000
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	57.526.950
Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	1	189.221.000
Jumlah Nilai	8	1.942.627.078

C.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp154.013.000*

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp154.013.000 dan Rp254.281.160.

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2023	254.281.160
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Koreksi tambah	-
Mutasi kurang:	-
Transfer Keluar ke BKHIT Gorontalo	100.268.160
Saldo Per 31 Desember 2024	154.013.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	42.339.189
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	111.673.811

Terdapat mutasi kurang (transfer keluar) aset Jalan, Irigasi dan Jaringan stasiun KIPM Gorontalo sebesar Rp100.268.160. ke satker BKHIT Gorontalo. Rincian aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang ditransfer keluar adalah sebagai berikut :

Nama Barang	Kuantitas	Nilai
Jalan Khusus Kompleks	100 M2	13.588.000
Saluran Pembuang	1	7.241.000
Bak Penyimpanan/Tower Air Baku	1	53.469.160
Bangunan Jembatan (Bangunan Pelengkap Pengem	1	1.733.000
Bak Penampung/Kolam/ Menara Penampungan	1	24.237.000
Jumlah Nilai	4	100.268.160

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap Lainnya
Rp45.170.000,-*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp45.170.000 dan Rp45.170.000 Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2024.

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp 0*

Tidak terdapat saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2024.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp 4.610.292.107)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing (Rp4.610.292.107) dan (Rp5.536.612.444). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2024

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4.600.647.392	4.174.634.582	426.012.810
2	Gedung dan Bangunan	3.021.985.932	393.318.336	2.628.667.596
3	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	154.013.000	42.339.189	111.673.811
4	Aset Tetap Lainnya	45.170.000	0	45.170.000
Akumulasi Penyusutan		7.821.816.324	4.610.292.107	3.211.524.217

<i>Piutang Jangka Panjang Rp0</i>	<p>C.3. Piutang Jangka Panjang</p> <p>Tidak terdapat saldo Piutang Jangka Panjang Stasiun KIPM Gorontalo per 31 Desember 2024</p>
<i>Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp0</i>	<p>C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)</p> <p>Tidak terdapat Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Stasiun KIPM Gorontalo per 31 Desember 2024</p>
<i>Tagihan Penjualan Angsuran Rp0</i>	<p>C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran</p> <p>Tidak terdapat Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2024.</p>
<i>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Rp0</i>	<p>C.3.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang</p> <p>Tidak terdapat saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Stasiun KIPM Gorontalo per tanggal 31 Desember 2024</p>
<i>Aset Lainnya Rp0</i>	<p>C.4. Aset Lainnya</p> <p>Tidak terdapat Saldo Aset Lainnya Stasiun KIPM Gorontalo per tanggal 31 Desember 2024.</p>
<i>Aset Tak Berwujud Rp0</i>	<p>C.4.1. Aset Tak Berwujud</p> <p>Tidak terdapat Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024</p>

C.4.2. Aset Lain-Lain

*Aset Lain-Lain
Rp0*

Tidak terdapat Saldo Aset Lain-lain Stasiun KIPM Gorontalo per tanggal 31 Desember 2024.

C.4.3. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp0*

Tidak terdapat Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Stasiun KIPM Gorontalo per tanggal 31 Desember 2024.

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atas jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN
Rp0*

Tidak terdapat Saldo Uang Muka dari KPPN Stasiun KIPM Gorontalo per tanggal 31 Desember 2024.

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp9.817.991*

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp9.817.991 dan Rp18.193.502 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga Stasiun KIPM Gorontalo per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2024

Uraian	Utang kepada pihak ke tiga	
	2024	2023
Pembayaran Listrik	8.291.802	15.856.086
Pembayaran Air	637.798	1.449.025
Pembayaran Telepon	888.391	888.391
Jumlah	9.817.991	18.193.502

C.5.3. Pendapatan Diterima Dimuka

*Pendapatan
Diterima Dimuka
Rp0*

Tidak terdapat saldo Pendapatan Diterima di Muka Stasiun KIPM Gorontalo per tanggal 31 Desember 2024. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang / jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP.

C.5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

*Beban yang Masih
Harus Dibayar
Rp0*

Tidak terdapat saldo Beban yang Masih Harus Dibayar Stasiun KIPM Gorontalo per tanggal 31 Desember 2024.

C.6. Ekuitas

*Ekuitas
Rp6.930.603.100*

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6.930.603.100 dan Rp10.641.895.161 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP
Rp29.010.000*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp29.010.000 dan Rp15.570.000. Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 46,33 persen. PNBP Stasiun KIPM Gorontalo tersebut terdiri dari :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2024 dan TA 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya (425289)	28.930.000	15.150.000	47,63
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan (425332)	80.000	420.000	-425,00
Total	29.010.000	15.570.000	46,33

Pendapatan Negara bukan pajak pada LO sebesar Rp29.010.000 sedangkan di LRA sebesar Rp30.252.797 terdapat selisih sebesar Rp1.242.797 yang berasal dari Pengembalian belanja pegawai TAYL Tukin bulan Desember 2023 sebesar Rp542.797 dan Pengembalian belanja barang perjalanan dinas sebesar Rp700.000.

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp1.903.176.191

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.903.176.191 dan Rp3.471.982.255

Rincian Pos-Pos LO dan LRA TA 2024

Uraian	Nilai (Rp)
Beban Pegawai LO	1.903.176.191
Realisasi LRA	1.903.176.191
Selisih	-

Berikut rincian beban pegawai Stasiun KIPM Gorontalo :

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	671.596.900	1.238.213.300	-84,37
Beban Pembulatan Gaji PNS	10.970	17.740	-61,71
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	40.419.440	92.887.310	-129,81
Beban Tunj. Anak PNS	12.669.038	28.621.114	-125,91
Beban Tunj. Struktural PNS	12.600.000	12.600.000	0,00
Beban Tunj. Fungsional PNS	33.470.000	95.880.000	-186,47
Beban Tunj. PPh PNS	4.243.626	671.500	84,18
Beban Tunj. Beras PNS	33.240.780	80.965.560	-143,57
Beban Uang Makan PNS	90.150.000	209.627.000	-132,53
Beban Tunjangan Umum PNS	10.580.000	12.740.000	-20,42
Beban Gaji Pokok PPPK	38.443.200	-	100,00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	355	-	100,00
Beban Tunj. Beras PPPK	869.040	-	100,00
Beban Uang Makan PPPK	6.452.800	-	100,00
Beban Tunjangan Umum PPPK	2.220.000	-	100,00
Beban Uang Lembur	27.460.000	76.460.000	-178,44
Beban Uang Lembur PPPK	1.256.000	-	100,00
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) PNS	864.951.678	1.623.298.731	-87,68
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) PPPK	52.542.364	-	100,00
Jumlah	1.903.176.191	3.471.982.255	-82,43

Dibandingkan dengan Tahun 2023 beban pegawai Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 82,43 persen.

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp146.731.016*

Jumlah Beban Persediaan TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp146.731.016 dan Rp185.063.342. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Pos-Pos LO dan LRA TA 2024

Uraian	Nilai (Rp)
Beban Persediaan di LO	146.731.016
Realisasi belanja persediaan LRA	55.371.000
Selisih	91.360.016

Selisih dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	Nilai (Rp)
Belanja persediaan di LRA	55.371.000
Penambahan :	
Saldo awal Persediaan	147.616.449
Transfer masuk Sertifikat SMKHP	367.500
Pengurangan :	
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	16.659.000
Beban Persediaan suku cadang	30.925.265
Beban Persediaan Rusak/Usang	47.794
Saldo Akhir Persediaan 31 Desember 2024	8.991.874
Total	146.731.016
Beban Persediaan di LO	146.731.016
Selisih	-

Berikut rincian beban persediaan Stasiun KIPM Gorontalo :

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	146.731.016	180.978.342	-23,34
Beban Persediaan Bahan Baku	0	4.085.000	#DIV/0!
Beban Persediaan lainnya	0	0	#DIV/0!
Jumlah Beban Persediaan	146.731.016	185.063.342	-26,12

Dibandingkan dengan Tahun 2023 beban persediaan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 26,12 persen.

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa
Rp1.149.937.875*

Jumlah Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.149.937.875 dan Rp1.292.535.057.

Rincian Pos-Pos LO dan LRA TA 2024

Uraian	Nilai (Rp)
Beban Barang dan Jasa di LO	1.149.937.875
Realisasi belanja Barang dan Jasa LRA	1.158.313.386
Selisih	(8.375.511)

Selisih dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	Nilai (Rp)
Belanja Barang dan Jasa di LRA	1.158.313.386
Penambahan :	
Listrik, Telpon dan Air Desember 2024	9.817.991
Pengurangan :	
Listrik, Telpon dan Air Desember 2023	18.193.502
Total	1.149.937.875
Beban Barang dan Jasa di LO	1.149.937.875
Selisih	-

Berikut rincian beban barang dan jasa Stasiun KIPM Gorontalo :

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	516.151.893	616.927.183	-19,52
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	36.423.000	123.994.000	-240,43
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pus	569.800	1.937.800	-240,08
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	44.784.000	106.422.000	-137,63
Beban Barang Operasional Lainnya	18.639.940	37.507.790	-101,22
Beban Bahan	14.504.700	82.025.200	-465,51
Beban Honor Output Kegiatan	3.264.000	8.160.000	-150,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	16.500.000	1.500.000	90,91
Beban Langganan Listrik	112.943.763	148.629.857	-31,60
Beban Langganan Telepon	10.916.892	12.843.982	-17,65
Beban Langganan Air	14.142.407	12.840.245	9,21
Beban Jasa Lainnya	316.097.480	139.747.000	55,79
Beban Sewa	45.000.000	-	100,00
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	#DIV/0!
Jumlah	1.149.937.875	1.292.535.057	-12,40

Dibandingkan dengan Tahun 2023 beban barang dan jasa Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 12,40 persen.

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
Rp351.511.548*

Beban Pemeliharaan TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp351.511.548 dan Rp318.924.945.

Rincian Pos-Pos LO dan LRA TA 2024

Uraian	Nilai (Rp)
Beban Pemeliharaan di LO	351.511.548
Realisasi belanja Pemeliharaan LRA	303.927.283
Selisih	47.584.265

Selisih dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	Nilai (Rp)
Belanja Pemeliharaan di LRA	303.927.283
Penambahan :	
Belanja persediaan bahan Pemeliharaan	16.659.000
Belanja persediaan suku cadang	30.925.265
Pengurangan :	
	-
Total	351.511.548
Beban Pemeliharaan di LO	351.511.548
Selisih	-

Berikut rincian beban pemeliharaan Stasiun KIPM Gorontalo :

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	167.550.000	122.728.830	26,75
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	136.377.283	148.526.835	-8,91
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	16.659.000	32.006.000	-92,12
Beban persediaan suku cadang	30.925.265	15.663.280	49,35
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	-	-	#DIV/0!
Jumlah	351.511.548	318.924.945	9,27

Dibandingkan dengan Tahun 2023 beban pemeliharaan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 9,27 persen.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp387.472.957*

Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp387.472.957 dan Rp586.599.831. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Pos-Pos LO dan LRA TA 2024

Uraian	Nilai (Rp)
Beban Perjalanan Dinas di LO	387.472.957
Beban Perjalanan Dinas di LRA	387.472.957
Selisih	-

Berikut rincian beban perjalanan dinas Stasiun KIPM Gorontalo :

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	128.831.142	167.830.000	-30,27
Beban Perjalanan Dinas Dalam	21.421.400	69.150.000	-222,81
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	18.500.000	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	237.220.415	331.119.831	-39,58
Jumlah	387.472.957	586.599.831	-51,39

Dibandingkan dengan Tahun 2023 beban perjalanan dinas Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 51,39 persen, penurunan terjadi karena kebijakan Kementerian Keuangan tentang penghematan anggaran belanja perjalanan dinas.

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Tidak terdapat saldo Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2024 dan TA 2023.

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0*

D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan Sosial
Rp0*

Tidak terdapat Beban Bantuan Sosial TA 2024 dan TA 2023

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp258.451.601*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp531.137.236 dan Rp531.137.236.

Berikut rincian beban penyusutan dan amortisasi Stasiun KIPM Gorontalo :

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	201.094.173	415.290.047	-106,52
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	53.547.377	107.094.755	-100,00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	1.132.333	#DIV/0!
Beban Penyusutan Irigasi	2.396.742	4.793.483	-100,00
Beban Penyusutan Jaringan	1.413.309	2.826.618	-100,00
Jumlah Penyusutan	258.451.601	531.137.236	-105,51
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-

D.10. Beban Penyisihan piutang tak tertagih

*Beban Penyisihan piutang tak tertagih
Rp0*

Tidak terdapat Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2024

D.11. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional

*Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
Rp652.206*

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan

fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp652.206 dan Rp1.080.000.

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan TA 2023

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	1.080.000	#DIV/0!
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	700.000	-	100,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	#DIV/0!
Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			#DIV/0!
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	#DIV/0!
Beban Persediaan Rusak/Usang	47.794	-	100,00
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	652.206	1.080.000	-65,59

D.12. Pos Luar Biasa

*Pos Luar
Biasa
Rp0*

Tidak terdapat saldo pendapatan atau beban Pos Luar Biasa TA 2024

E. PENJELASAN ATAS POS-POS PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp10.641.895.161

Nilai ekuitas awal untuk periode yang berakhir pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp10.641.895.161 dan Rp10.923.497.305.

E.2. Surplus (Defisit) LO

Defisit LO
(Rp4.310.034.375)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp4.310.034.375) dan (Rp6.369.595.380) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan Non operasional, dan Pos luar biasa.

Rincian Defisit LO Stasiun KIPM Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut:

URAIAN	TA 2024	TA 2023	Kenaikan (penurunan) %
Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	(4.310.686.581)	(6.370.675.380)	(32,335)
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	652.206	1.080.000	(39,611)
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	-	-	-
Defisit LO	(4.310.034.375)	(6.369.595.380)	(32,334)

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

*Penyesuaian
Nilai Aset*
Rp0,-

Tidak terdapat Saldo Penyesuaian Nilai Aset TA 2024 dan TA 2023. pada Stasiun KIPM Gorontalo.

E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai
Persediaan*
Rp0,-

Tidak terdapat Koreksi Nilai Persediaan TA 2024 dan TA 2023 pada Stasiun KIPM Gorontalo.

E.3.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap
Rp0*

Tidak terdapat Saldo Selisih Revaluasi Aset Tetap TA 2024 dan TA 2023 pada Stasiun KIPM Gorontalo.

E.3.4. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

*Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi
Rp0*

Tidak terdapat Saldo Koreksi Nilai Aset tetap Non revaluasi TA 2024 dan TA 2023 pada Stasiun KIPM Gorontalo.

E.3.5. Koreksi Lain-Lain

*Koreksi Lain-Lain
Rp2.714*

Koreksi Lain-Lain TA 2024 dan TA 2023 pada Stasiun KIPM Gorontalo adalah masing-masing sebesar Rp2.714 dan Rp915. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara namun merupakan koreksi atas penyisihan piutang tak tertagih.

E.4. Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar
Entitas
Rp598.739.600*

Nilai Transaksi Antar Entitas TA 2024 dan TA 2023 pada Stasiun KIPM Gorontalo adalah masing-masing sebesar Rp598.739.600 dan Rp6.087.992.321.

Transaksi Antar Entitas	TA 2024	TA 2023
Diterima dari Entitas Lain	(30.252.797)	(16.832.968)
Ditagihkan ke Entitas Lain	3.808.260.817	6.104.825.289
Transfer Masuk	367.500	-
Transfer Keluar	(3.179.635.920)	-
Pengesahan Hibah Langsung	-	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah	598.739.600	6.087.992.321

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024 pendapatan Negara atau DDEL sebesar Rp30.252.797 sedangkan belanja negara atau DKEL sebesar Rp(3.808.260.817) sedangkan transfer masuk berupa sertifikat SMKHP dari Setban BPPMHKP sebesar Rp367.500 dan Transfer keluar berupa Aset Tanah, Gedung Bangunan, Peralatan Mesin dan Jalan jembatan dan irigasi sebesar (Rp3.179.635.920).

E.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp6.930.603.100

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6.930.603.100 dan Rp10.641.895.161 Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan saldo awal ekuitas, surplus/defisit lo, penyesuaian nilai tahun berjalan, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dan transaksi antar entitas.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk diungkapkan pada Laporan Keuangan Tahun 2024

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK pada Tahun 2024

F.2.2. Temuan dan Tindak Lanjut Inspektorat Jenderal KKP

Temuan Inspektorat tentang Hasil Audit Kinerja TA 2023 dan TA 2024 pada Stasiun KIPM Gorontalo Nomor : T.264/ITJ.4/HP.110/IX/2024 Tanggal 24 September 2024 tentang Hasil Audit Kinerja TA 2023 dan TA 2024 pada Stasiun KIPM Gorontalo.

- Temuan 1 yaitu pelaksanaan surveilen Hazard Analysis and Critical Control Point pada Unit Pengolahan Ikan belum sepenuhnya sesuai ketentuan atas temuan tersebut sudah ditanggapi dengan surat Nomor B.395/SKIPM.GTO/HP.110/X/2024 Tgl 11 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Kepala SKIPM Gorontalo yang ditujukan kepada Penanggung Jawab Kegiatan Surveilen HACCP dan rekomendasi temuannya sudah ditindaklanjuti.
- Temuan 2 yaitu pengambilan sampel uji organolaptik lapangan dalam rangka penerbitan SKIPP (HC Mutu) belum sesuai ketentuan atas temuan tersebut sudah ditanggapi dengan surat Nomor B.392/SKIPM.GTO/HP.110/X/2024 Tgl 11 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Kepala SKIPM Gorontalo yang ditujukan kepada Ketua Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan rekomendasi temuannya sudah ditindaklanjuti.

- Temuan 3 yaitu tata kelola penggunaan alat angkutan darat bermotor belum sesuai ketentuan atas temuan tersebut sudah ditanggapi dengan surat Nomor B.393/SKIPM.GTO/HP.110/X/2024 Tgl 11 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Kepala SKIPM Gorontalo yang ditujukan kepada KPA/ Kepala BPPMHKP Gorontalo, Penanggung jawab/ Pemegang Kendaraan Dinas BPPMHKP Gorontalo, Bendahara Pengeluaran dan rekomendasi temuannya sudah ditindaklanjuti.
- Temuan 4 yaitu terdapat alokasi honor pengelola keuangan tidak sesuai ketentuan atas temuan tersebut sudah ditanggapi dengan surat Nomor B.391/SKIPM.GTO/HP.110/X/2024 Tgl 11 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Kepala SKIPM Gorontalo yang ditujukan kepada KPA/ Kepala BPPMHKP Gorontalo dan rekomendasi temuannya sudah ditindaklanjuti.
- Temuan 5 yaitu pertanggungjawaban belanja barang dan perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan atas temuan tersebut sudah ditanggapi dengan surat Nomor B.394/SKIPM.GTO/HP.110/X/2024 Tgl 11 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Kepala SKIPM Gorontalo yang ditujukan kepada PPK, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran BPPMHKP Gorontalo dan rekomendasi temuannya sudah ditindaklanjuti.

Terdapat Transfer keluar (TK) Aset pada Stasiun KIPM Gorontalo ke BKHIT Gorontalo sesuai BA Serah Terima BMN antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai pihak pertama dengan Nomor Pihak kesatu : 932/SJ/PL.450/XI/2024 Tanggal 18 November 2024 kepada Badan Karantina Indonesia (BKI) dengan Nomor pihak kedua : 9970/PL..330/B/11/2024 Tanggal 18 November 2024. Adapun Aset BMN yang di serahterimakan sebagai berikut :

- Tanah dan/atau Bangunan sejumlah 15 unit dengan nilai perolehan seluruhnya senilai Rp3.351.770.023.
- Selain Tanah dan/atau Bangunan sejumlah 94 unit dengan nilai perolehan seluruhnya senilai Rp1.155.053.228.

Terdapat Transfer masuk (TM) dari Setban BPPMHKP kepada Stasiun KIPM Gorontalo berupa sertifikat SMKHP kode-H 2024 dengan BAST Nomor 710/BPPMHKP1/PL520/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 sebanyak 50 lembar senilai Rp367.500.

F.2.3. Catatan Penting Lainnya

LAPORAN PN SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Kementerian/Lembaga : Kementerian Kelautan dan Perikanan
Unit Organisasi : BPPMHKP
Satker : Stasiun KIPM Gorontalo

Program/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
3989.PDC Sertifikasi Produk 001 - Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	20.000.000	16.642.796	83,21	Produk	6	8	133
3989.PDC Sertifikasi Produk 002 - Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	10.000.000	9.931.465	99,31	Produk	4	4	100
3989.PDF Sertifikasi Lembaga 002 - Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	87.000.000	71.604.741	82,30	Lembaga	15	15	100
3989.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga 001 - Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability	8.000.000	8.000.000	100	Lembaga	1	1	100
3989.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga 002 - UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	40.000.000	39.990.540	99,98	Lembaga	5	10	200
7010.PBR - Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan 001 - Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji	70.000.000	69.947.602	99,93	Rekomendasi	1	1	100
7010.PDD - Standarisasi Lembaga 001 - Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	9.000.000	-	0,00	Lembaga	1	1	100
7010.PDD - Standarisasi Lembaga 002 - Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium	43.500.000	43.438.540	99,86	Lembaga	1	1	100
7010.QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk 001 - Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	9.000.000	8.312.100	92,36	Produk	1	1	100

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2024

Kementerian/Lembaga : Kementerian Kelautan dan Perikanan
Unit Organisasi : BPPMHKP
Satker : Stasiun KIPM Gorontalo
Fungsi : Ekonomi
Sub Fungsi : Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan
Program : Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Lokasi : Gorontalo

Kode	Kegiatan	Belanja			Output				Ket
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	Supplier yang menerapkan Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB)	30.000.000	28.290.000	94,30	5	9	Lembaga	180	
001	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada upi	20.000.000	16.642.796	83,21	6	8	Produk	133,33333	
002	Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi	10.000.000	9.931.465	99,31	4	4	Produk	100	
002	Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	87.000.000	71.604.741	82,30	15	15	Lembaga	100	
001	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability	8.000.000	8.000.000	100,00	1	1	Lembaga	100	
002	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil	40.000.000	39.990.540	99,98	5	10	Lembaga	200	
001	Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan	13.000.000	12.281.900	94,48	1	1	Kegiatan	100	
001	Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan pengujian sektor kelautan perikanan	70.000.000	69.947.602	99,93	1	1	Rekomendasi kebijakan	100	
001	Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	9.000.000	-	0,00	1	1	Lembaga	100	
002	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium	43.500.000	43.438.540	99,86	1	1	Lembaga	100	
001	Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem	9.000.000	8.312.100	92,36	1	1	Produk	100	
956	Layanan BMN	12.797.000	12.796.088	99,99	2	2	Layanan	100	
960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	52.842.000	52.542.672	99,43	4	4	Layanan	100	
994	Layanan Perkantoran	3.352.584.000	3.334.566.440	99,46	12	12	Layanan	100	
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	70.395.000	70.132.005	99,63	1	1	Dokumen	100	
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4.050.000	4.050.000	100,00	2	2	Dokumen	100	
955	Layanan Manajemen Keuangan	25.774.000	25.734.368	99,85	12	12	Dokumen	100	
	Pagu Blokir	-	30.658.000						Kebijakan S-1023/M.K.02/2024
	Total	3.827.284.000	3.808.261.261	99,50					